

PRAKTIK PEMBERDAYAAN DIFABEL
(Studi Kasus Program Kerja E-Warong Kelompok Difabel Desa (KDD)
Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

Ananda Ayu Shabrina
NIM 18102050069

Pembimbing:

Andayani, S.IP, MSW.
NIP : 197210161999032008

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-199/Un.02/DD/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBERDAYAAN DIFABEL (STUDI KASUS PROGRAM KERJA E-WARUNG KELOMPOK DIFABEL DESA(KDD) HARGOMULYO, KOKAP, KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANDA AYU SHABRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050069
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 63d3a6096e994



Penguji I

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63e865d9e28b



Penguji II

Noorkamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 63e7634928347



Yogyakarta, 17 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63d76766a8b7d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ananda Ayu Shabrina
NIM : 18102050069
Judul Skripsi : Praktik Pemberdayaan Difabel (Studi Kasus Program Kerja E-Warong Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si
NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Pembimbing

Andayani, S.IP., MSW.
NIP 197210161999032008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Ayu Shabrina
NIM : 18102050069
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Praktik Pemberdayaan Difabel (Studi Kasus Program Kerja E-Warong Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo Kokap, Kulon Progo)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dubenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ananda Ayu Shabrina
NIM 18102050069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Ananda Ayu Shabrina

NIM : 18102050069

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip niali. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan



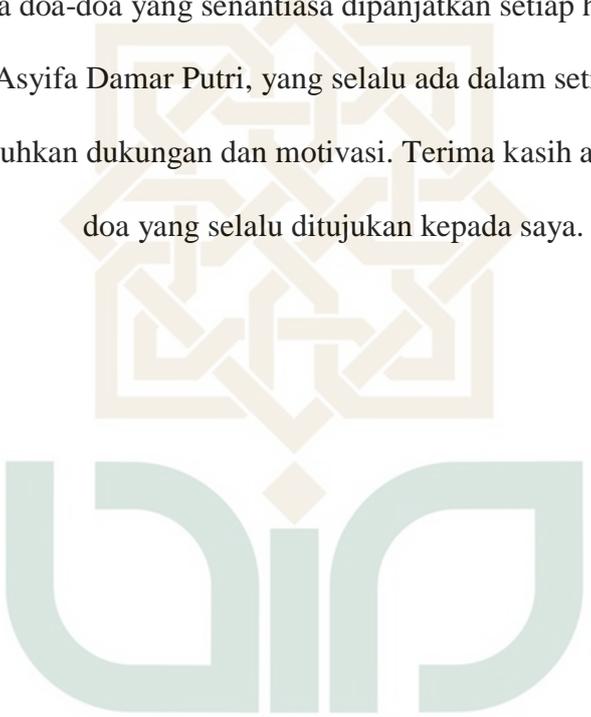
Ananda Ayu Shabrina
NIM 18102050069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Miyarsa dan Ibu Triwidayati yang selalu memberikan dukungan, baik moral dan material. Serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan setiap harinya. Kakak saya satu-satunya Asyifa Damar Putri, yang selalu ada dalam setiap keadaan penulis disaat membutuhkan dukungan dan motivasi. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang selalu ditujukan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku, dan agar
engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku

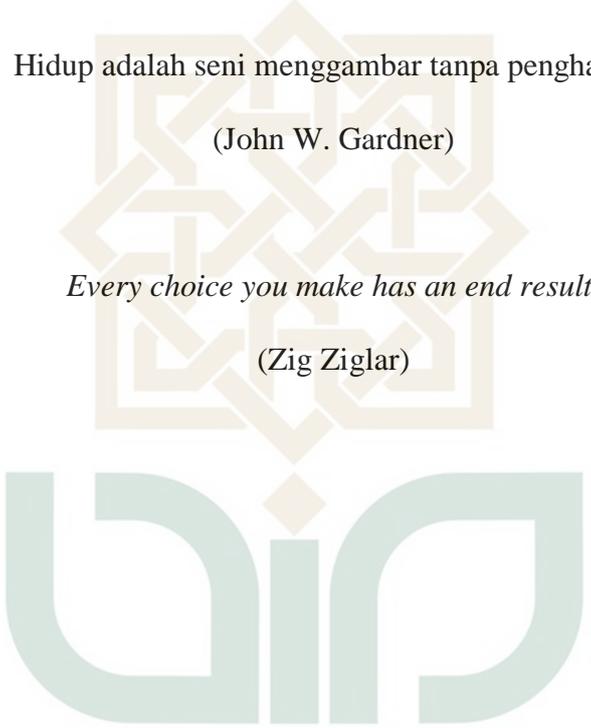
(Q.S At-Ta-Ha :39)

Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus.

(John W. Gardner)

Every choice you make has an end result.

(Zig Ziglar)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Praktik Pemberdayaan Difabel (Studi Kasus Program Kerja E-Warong Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo)”** untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana sosial.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, antara lain kepada.

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.PD. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Andayani, S.IP, MSW. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan saran, nasihat, dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Idan Ramdani, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Staff Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Hepy Eko Nugroho, SP.MM, Bapak Wahyu Budiarto, S.IP, Bapak Taufik Aji, Ibu Noviana Rahmawati S.Sos., M.A., M.P.A., dan seluruh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo yang sudah memberikan izin, mendukung dan membantu penulis dalam penelitian.
9. Bapak Hasta Nurani, Bapak Sakiran, Ibu Sumiyati, Bapak Sugiyanto dan seluruh anggota KDD Hargomulyo yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk penelitian.
10. Kedua orang tua saya tercinta, serta kakak saya tersayang yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dan mengajarkan arti kesabaran.
11. Sahabat-sahabat di kampus khususnya Aulia, Krisma, Thalia, Hasnaa, Sintya, Ana W dan Ana Choi, Kiki V, Imel, Iyum, Cilayasa, Nurwanto, Syidan, Winda yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan memberikan semangat hingga menjadi tempat berkeluh kesah.
12. Sahabat-sahabat sejak remaja Biru, Cicik, Rinda, Intan, Bibah, Ripa, Tika yang telah mendukung penulis, memberikan semangat hingga menjadi tempat berkeluh kesah.
13. Teman-teman KKN UIN Baluhadika yang selalu menjadi teman, sahabat, dan keluarga hingga sekarang.
14. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dan memberi arti di masa kuliah hingga saat ini.

15. Semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan Skripsi mulai dari awal hingga akhir.

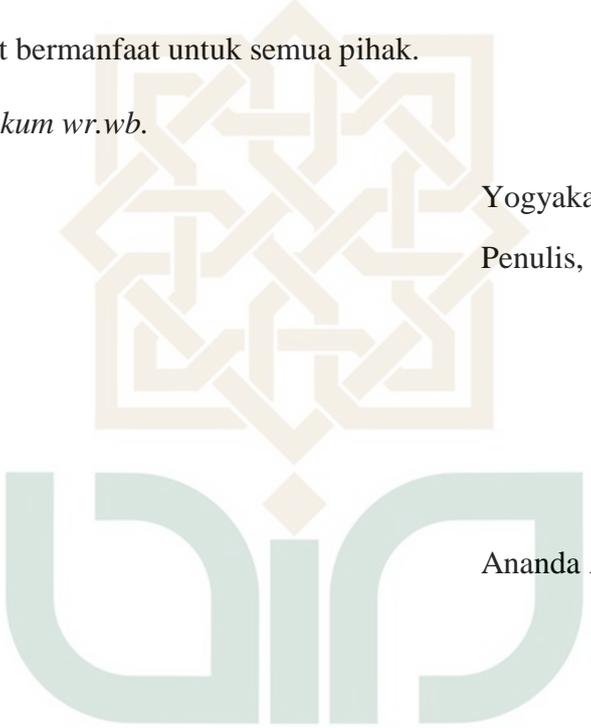
Demikian skripsi ini disusun. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, baik saran maupun kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Penulis,

Ananda Ayu Shabrina



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRAKTIK PEMBERDAYAAN DIFABEL
(Studi Kasus Program Kerja E-Warong Kelompok Difabel Desa (KDD)
Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo)

Ananda Ayu Shabrina

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Praktik pemberdayaan difabel dalam Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui program E-Warong merupakan upaya pemberian kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat marginal untuk dapat bersaing secara mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok Difabel Desa sendiri merupakan kelompok pemberdayaan untuk disabilitas yang ada di desa tersebut. Sedangkan E-Warong merupakan program dari Kementerian Sosial RI dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara non tunai.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa Hargomulyo melalui Program E-Warong beserta hambatan yang mereka alami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian menunjukkan praktik pemberdayaan difabel dalam KDD Hargomulyo melalui Program E-Warong berjalan dengan menggunakan tiga aspek pemberdayaan yakni *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Pada praktik pemberdayaan tersebut memakai empat prinsip pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan berkelanjutan. Aspek dan prinsip tersebut menghasilkan kelompok yang mampu berdikari secara mandiri melalui kegiatan penyaluran bantuan sosial dalam E-Warong KDD Hargomulyo, serta mendapatkan arahan, perlindungan, dan pengawasan dari pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Hambatan yang mereka alami berasal dari dalam dan luar kelompok antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatannya hingga adanya gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan E-Warong.

Kata Kunci: Pemberdayaan Difabel, Kelompok Difabel Desa (KDD), Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Manfaat Secara Teoritis | 7 |
| 2. Manfaat Secara Praktis..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Pemberdayaan Masyarakat..... | 12 |
| 2. Penyandang Disabilitas..... | 18 |
| G. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 23 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| 3. Sumber Data..... | 24 |
| 4. Subjek dan Objek Penelitian | 25 |
| 5. Teknik Pengumpulan Informan..... | 26 |
| 6. Metode Pengumpulan Data..... | 27 |
| 7. Teknik Analisis Data..... | 30 |
| 8. Uji Keabsahan | 32 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 33 |
| BAB II: GAMBARAN UMUM..... | 35 |
| A. Letak Geografis Kalurahan Hargomulyo..... | 35 |

| | |
|---|----|
| B. Kondisi Demografis Kalurahan Hargomulyo | 37 |
| C. Lembaga Desa..... | 39 |
| D. Lembaga Pendidikan..... | 40 |
| E. Profil Kelompok Difabel Desa Hargomulyo | 40 |
| 1. Sejarah Singkat Terbentuknya KDD Hargomulyo | 40 |
| 2. Susunan Pengurus KDD Hargomulyo | 41 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan yang ada di KDD Hargomulyo | 42 |
| F. Bantuan Pangan Non Tunai dan E-Warong..... | 44 |
| 1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... | 44 |
| 2. Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) | 45 |
| G. Deskripsi Informan | 47 |

BAB III: PRAKTIK PEMBERDAYAAN DIFABEL OLEH KDD HARGOMULYO MELALUI PROGRAM E-WARONG 51

| | |
|---|----|
| A. Pemberdayaan Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui Program E-Warong | 52 |
| 1. Aspek Pemberdayaan | 56 |
| 2. Prinsip dalam Pemberdayaan | 66 |
| B. Dampak Pemberdayaan | 74 |
| 1. Dampak Ekonomi..... | 74 |
| 2. Dampak Sosial | 75 |
| C. Hambatan yang dialami dalam proses pemberdayaan | 78 |
| 1. Hambatan Internal..... | 79 |
| 2. Hambatan Eksternal | 81 |

BAB IV: PENUTUP..... 84

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 87 |

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN..... 93

1. Lampiran Surat Penelitian
2. Lampiran Dokumentasi
3. Lampiran Pedoman Wawancara
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Grafik Data Penyandang Disabilitas di DIY | 1 |
| Gambar 2. Peta Kalurahan Hargomulyo | 36 |
| Gambar 3. Warung Bapak Sugiyanto..... | 58 |
| Gambar 4. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial BPNT melalui E-Warong KDD Hargomulyo menggunakan mesin EDC | 63 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Kependudukan Berdasarkan Agama | 37 |
| Tabel 2. Data Disabilitas | 37 |
| Tabel 3. Berdasarkan Kelompok Usia | 38 |
| Tabel 4. Kegiatan KDD Hargomulyo | 43 |
| Tabel 5. Pendapatan E-Warong KDD Hargomulyo Perbulan | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penyandang disabilitas merupakan masyarakat minoritas. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, menyatakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 9,7 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 26 Juta orang dari 275,8 Juta penduduk.¹ Sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, penyandang disabilitas mencapai 26.866 Jiwa. Data Persebaran jumlah tersebut dapat dilihat sebagai berikut:²

Gambar 1. Grafik Data Penyandang Disabilitas di DIY



Sumber: Laporan Hasil Pemutkhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY Tahun 2021.

¹ Article 33 Indonesia, “[Tempo.Co] Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas,” *Article 33 Indonesia*, <https://article33.or.id/id/berita/tempo-co-hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas/>.

² Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Hasil Pemutkhiran Data PPKS Dan PSKS Dinas Sosial DIY Tahun 2021* hlm. 26.

Jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sendiri menurut Badan Pusat Statistik berjumlah 4.021.816 jiwa.³ Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwasanya penyandang disabilitas merupakan masyarakat minoritas. Minoritas di Indonesia sendiri kerap mendapatkan perilaku yang berbeda atau mendapatkan perilaku kesenjangan dari masyarakat pada umumnya.

Dikutip dari Kompas.com pada 3 Desember 2021, Para penyandang disabilitas di Indonesia sendiri masih kerap mendapatkan kesenjangan dalam mendapatkan hak mereka serta rentan terhadap diskriminasi, salah satu yang utama adalah dalam meraih kesempatan kerja atau dalam usaha mandiri. Tentunya, mendapatkan pekerjaan merupakan suatu hal yang penting bagi semua orang. Adanya keterbatasan yang hadir ditengah-tengah mereka tidak lantas mengurangi hak mereka dalam hidup dan kehidupan.

Di Indonesia, dalam kehidupan bernegara, penyandang disabilitas dijamin hak dan kewajibannya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU tersebut yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interkasinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warna negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

³ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, “Jumlah Penduduk DIY” <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

Tentunya sikap dan perilaku kesenjangan beralas disabilitas tersebut bertentangan dengan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan dan hak (asasi) pada pengembangan keberfungsian sosial semua elemen masyarakat, serta pada pemberdayaan individu, kelompok, organisasi, keluarga, dan komunitas guna memajukan kondisi keberadaan mereka, serta menutup segala bentuk diskriminasi dan penindasan.⁵

Namun tentu saja beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang sosial seperti yang telah tertuang pada UU No 8 Tahun 2016. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam penyediaan akses untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek, salah satunya dapat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah metode pembangunan baik dalam ekonomi maupun politik yang dapat melahirkan inisiatif masyarakat untuk memulai kegiatan sosial yang bertujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁶

Dalam penelitian Damiana Vania Puspita dan Eka Zuni Lusi Astuti mengutip pendapat dari Soetomo mengatakan, unsur utama dari proses pemberdayaan adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut terjadi karena tidak semua

⁵ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Journal of Social Welfare*, no. 2 (November 18, 2019), hlm 3.

⁶ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, "Pemberdayaan Masyarakat" (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 47.

masyarakat memiliki kapasitas dan kewenangan yang mengakibatkan masyarakat kurang berdaya, dan mereka tidak memiliki peluang untuk merancang masa depan. Hal ini menjadikan mereka tidak sejahtera. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan sebagian kewenangan tersebut melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan juga merupakan budaya yang memberi advokasi kepada masyarakat lokal atau marginal maupun tidak berdaya. Sehingga, dalam pemberian advokasi tersebut masyarakat dibekali kemampuan untuk meningkatkan keberfungsian dan kapasitas diri secara mandiri yang akan mendorong adanya perubahan dalam alokasi sumber daya, kekuatan dan daya tawar. Selain itu, pendekatan pemberdayaan berupaya melahirkan inklusi sosial sehingga terbentuk perubahan perlakuan dari pihak luar kepada pihak marginal dan pola relasi sosial dalam struktur sosial masyarakat antara pihak marginal dengan masyarakat pada umumnya.⁷

Adanya pemberian kewenangan dan partisipasi dalam program pemberdayaan yang inklusif ini tentu merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini karena pemberdayaan masyarakat yang inklusif dapat menjadi solusi atas minimnya peran penyandang disabilitas pada berbagai bidang yang ada di Indonesia, terutama dalam usaha mandiri.

Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis akan mengkaji praktik pemberdayaan inklusif yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD)

⁷ Damiana Vania Puspita dan Eka Zuni Lusi Astuti, "Praktik Baik Pemberdayaan Difabel Oleh Kelompok Difabel Desa Makmur Jati Mandiri," *Journal of Social Welfare* 22, no. 2 (Januari 3, 2022), hlm 4.

Hargomulyo dalam melibatkan penyandang disabilitas melalui program e-warong. Kegiatan ini merupakan inovasi pemberdayaan yang unik atau jarang dilakukan di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk meneliti ini.

KDD Hargomulyo merupakan kelompok pemberdayaan difabel yang ada di Dusun Tangkisan, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo. KDD ini dibentuk pada tahun 2017 sebagai bentuk upaya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas yang ada di Kapanewon Temon, Kulon Progo. KDD Hargomulyo sendiri merupakan wadah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat difabel untuk dapat berdikari secara mandiri dan mengeluarkan aspirasinya.

Bentuk dari pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas diri masyarakat difabel dapat dilihat dari ditunjuknya KDD Hargomulyo sebagai salah satu pelaksana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang kerap dikenal sebagai E-Warong. Yakni, bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warong (elektronik warong gotong royong).

Adanya E-Warong yang dikelola oleh Disabilitas ini merupakan bentuk keterbukaan kesempatan pemerintah terhadap seluruh warga tanpa membedakan. Di mana keterbukaan kesempatan dan cara pandang positif pemerintah desa terhadap difabel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai praktik pemberdayaan yang terjadi di dalam Kelompok Difabel Hargomulyo melalui program E-Warong. Bagaimana

mereka dapat mengelola warung secara mandiri dan dapat menjadi manfaat untuk diri mereka sendiri, keluarga hingga masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui Program E-Warong?
2. Bagaimana dampak dari praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo?
3. Apa hambatan yang dialami Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo dalam melakukan proses pemberdayaan melalui program E-Warong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, selanjutnya penulis ingin mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui program e-warong.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari praktik pemberdayaan yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam proses pemberdayaan yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) melalui program e-warong.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai sumbangsi pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmu oleh lembaga pendidikan khususnya studi mengenai Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait isu pemberdayaan untuk para penyandang disabilitas. Untuk memperkaya literatur mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan kepada para penyandang disabilitas, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran atau masukan untuk lembaga terkait.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktik dari penelitian ini yakni diharapkan dapat memberikan pemikiran, pandangan serta informasi baru untuk masyarakat dalam menghadapi dan memberikan upaya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas di daerahnya, terkhusus di Kabupaten Kulon Progo. Manfaat lainnya, sebagai masukan kepada Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo dalam proses pengelolaan e-warong, sehingga penelitian ini dapat dijadikan informasi serta memberikan semangat untuk mengembangkan e-warong yang telah dikelola menjadi lebih baik lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisis penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang penulis ambil sebagai pembanding. Adapun beberapa penelitian yang penulis ambil untuk dijadikan pembanding antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Damiana Vania Puspita dan Eka Zuni Lusi Astuti dengan judul Praktik Baik Pemberdayaan Difabel Oleh Kelompok Difabel Desa Makmur Jati Mandiri tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik penentuan informan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik baik pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelompok Difabel Desa (KDD) yang dibentuk menjadi wadah bagi masyarakat difabel untuk mengembangkan kapasitasnya serta menyampaikan aspirasinya (pemberian kewenangan). Beberapa bentuk praktik pemberdayaan difabel yang telah dilakukan oleh KDD Makmur Jati Mandiri antara lain: Pertemuan rutin bulanan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi warga difabel, pengembangan kapasitas berupa beberapa pelatihan yang telah terlaksana antara lain pelatihan membuat roti pisang pada tahun 2018, pelatihan membuat bros dari kain perca pada tahun 2019, pelatihan ternak ayam pada tahun 2017,

pelatihan ternak kambing pada tahun 2018, dan pelatihan *ecobrick* pada tahun 2018.

Selain beberapa praktik pemberdayaan yang telah dilakukan diatas, beberapa dari anggota Kelompok Difabel Desa juga turut ikut dalam proses pemberdayaan tersebut, salah satu contohnya ditunjuk sebagai kader. Dari beberapa praktik pemberdayaan tersebut, anggota Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri dapat berkembang secara mandiri secara baik dan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan dari beberapa program pemberdayaan yang sudah terlaksana.⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan Arni Surwanti dengan judul Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan berbagai pihak kepada penyandang disabilitas, mengeksplorasi upaya yang telah diimplementasikan, mengeksplorasi permasalahan mengenai upaya pemberdayaan, dan mengeksplorasi faktor pendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei, wawancara langsung melalui *Focus Group Discussion*, dan diseminasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dimana

⁸ Ibid, hlm. 7.

kebijakan sudah berjalan akan tetapi masih memiliki beberapa persoalan. Selain itu, implementasi pemberdayaan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh peraturan perundangan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan kepada disabilitas di Indonesia masih mengalami hambatan seperti kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya tingkat pendidikan, tidak ada jaringan, dan tidak ada keberlanjutan dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas yakni: dukungan keluarga, peralatan dan modal, lembaga pendampingan, pemasaran dan pengembangan produk serta adanya kesesuaian minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh.⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Estri Purwandari dengan judul Pemberdayaan Difabel Daksa Oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); Studi di Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul DIY tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dalam upaya pemberdayaan difabel daksa dan menjelaskan hasil dari pemberdayaan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

⁹ Arni Surwanti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (Maret 1, 2014), hlm. 40.

observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Hasil dari penelitian ini yakni menjelaskan strategi yang dilakukan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dalam melakukan proses pemberdayaan adalah dengan melalui beberapa bimbingan rehabilitasi, diantaranya: rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis dan bimbingan keterampilan. Dalam hal ini rehabilitasi sosial meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, dan *Activity Day Living* (ADL). Sedangkan rehabilitasi medis meliputi pelayanan klinik dan fisioterapi. Terakhir dalam bimbingan keterampilan terdapat desain grafis, komputer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit dan menjahit. Hasil dari proses pemberdayaan tersebut sangat membantu bagi penyandang disabilitas daksa yakni: menambah kepercayaan diri, memiliki kesadaran untuk berkembang, memiliki kesadaran untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain, serta memiliki bekal keterampilan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya. Proses pemberdayaan yang dilakukan BRTPD tersebut dirasa cukup berhasil dalam meningkatkan keberfungsian sosial disabilitas daksa.¹⁰

Keempat, Penelitian yang dilakukan Agus Imam Wahyudi dengan judul Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Keterampilan Studi di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Cabelan, Bantul, Yogyakarta tahun 2014. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

¹⁰ Estri Purwandari, “Pemberdayaan Difabel Daksa Oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD): Studi Di Dusun Piring, Desa Rihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DIY”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm 67.

mendapatkan gambaran dan pemahaman tentang pelaksanaan pemberdayaan difabel dalam rangka pemberian pengetahuan dan pelatihan keterampilan yang dilakukan Yayasan Mandiri dan diketahuinya hasil pemberdayaan difabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang diambil yakni menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini terbuka dan terstruktur.

Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan usaha yang dilakukan Yayasan Mandiri Craft dalam melakukan pemberdayaan kepada para difabel yakni dengan melakukan pemberian pengetahuan dan keterampilan usaha mainan edukatif, menjahit, bahasa Inggris, dan komputer. Hasilnya, para penyandang disabilitas dapat meningkatkan perekonomiannya, memiliki peluang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang digeluti, meningkatkan kepercayaan dirinya dan membuat para penyandang disabilitas tidak bergantung pada orang lain.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bersumber dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan, dan dapat diartikan lebih lanjut sebagai upaya untuk meraih

¹¹ Agus Imam Wahyudi, “Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Canean, Bantul, Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

kekuatan. Konsep pemberdayaan sendiri mengadopsi dari bahasa Inggris yakni berasal dari kata *empowerment*. Konsep pemberdayaan ini lahir dan berkembang di Eropa pada tahun 70-an hingga saat ini. Secara historis pemberdayaan pada masyarakat Eropa modern merupakan sebuah aksi penyejajaran dan pelepasan manusia dari despotisme keagamaan. Aksi penyejajaran dan pelepasan inilah yang kemudian menjadi akar dari pemberdayaan.¹²

Menurut Prijono dan Pranaka yang dikutip oleh Rr. Siti Kurnia Widiastuti dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, pemberdayaan memiliki dua makna, yakni: 1). Menumbuhkan, memperkuat, membersamai, dan memandirikan kedudukan masyarakat marginal atas penindasan di sektor kehidupan pada segala bidang, 2). Memberikan perlindungan, pembelaan, serta keberpihakan kepada masyarakat marginal untuk menangkal terjadinya persaingan tidak sehat serta adanya eksploitasi.¹³

Masih mengutip dalam buku karya Rr Siti Kurnia yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, Samuel Paul mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan adanya pengalokasian kekuasaan dengan adil yang dapat memajukan pemikiran politis dan kekuasaan kelompok lemah

¹² Rr Siti Kurnia Widiastuti dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis Penelitian Komunitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 9.

¹³ Ibid, Hlm. 13

serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.¹⁴

Pendapat lain mengenai definisi pemberdayaan diungkapkan juga oleh Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Edi mengungkapkan pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁵

Berdasarkan deskripsi yang sudah disebutkan, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai upaya pemberian kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat marginal dan rentan untuk bersaing secara mandiri dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik secara

¹⁴ Ibid, Hlm. 12

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

berkesinambungan sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan menurut Edi Suharto adalah memberikan penguatan kapasitas yang ada di dalam seorang individu maupun komunitas termasuk didalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan dan kesadaran melalui proses pemberdayaan individu dan kelompok yang dapat mengubah kualitas kehidupan mereka. Kapasitas yang termasuk di dalamnya adalah penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial besar yang bekerja sesuai dengan tujuan bersama.¹⁶

c. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Adi Fahrudin dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat menjelaskan lebih rinci terkait upaya yang dapat dilakukan untuk membawa masyarakat berkemampuan dan mandiri. Upaya tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yakni:

Pertama, *Enabling* yakni melahirkan situasi yang menguatkan potensi masyarakat dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut dianggap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada individu atau masyarakat yang tidak memiliki daya. Adanya pemberdayaan sebagai upaya

¹⁶ Ibid, Hlm. 39

untuk menciptakan daya dengan memotivasi, mensupport, dan mengobarkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan.

Kedua, *Empowering* yakni mendukung potensi yang dimiliki masyarakat dengan langkah nyata yakni, menyediakan berbagai masukan dan pembukaan akses dalam berbagai peluang yang akan melahirkan masyarakat semakin berdaya. Artinya, dalam upaya ini bermaksud untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memperkuat potensi atau daya yang mereka miliki. Sebagai contoh dalam kegiatan pemberdayaan, masyarakat dapat diberikan pendidikan mutu yang dapat mendambah informasi serta wawasan mereka untuk semakin berdaya serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Ketiga, *Protecting* yakni dengan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses ini harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi disini dapat dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan tidak seimbang serta adanya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.¹⁷

d. Prinsip-prinsip dalam Pemberdayaan

Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pemberdayaan di masyarakat, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang harus ada di

¹⁷ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2011).

dalam praktiknya. Menurut Dedeh Maryani dkk dalam buku Pemberdayaan Masyarakat, terdapat empat prinsip dalam sebuah praktik pemberdayaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

Pertama, Prinsip Kesetaraan dimana Kesetaraan sendiri berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Prinsip yang pertama yang harus ada dalam sebuah proses pemberdayaan yakni adanya ekualitas atau kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam artian, gerakan yang dibangun dapat menghubungkan dan mengembangkan mekanisme dari berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu dapat menjabarkan kekuatan dan kekurangan mereka sehingga terjadi proses saling belajar, membantu, bertukar pengalaman dan mendukung satu sama lain.

Kedua, Prinsip Partisipasi. Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, terencana, terlaksana, mendapatkan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dapat menstimulus kemandirian masyarakat dalam praktiknya. Untuk mencapai tingkat tersebut, tentu masyarakat memerlukan pendampingan yang melibatkan seorang pendamping yang memiliki komitmen dalam program pemberdayaan, dimana disini masyarakat mendapatkan arahan yang jelas untuk

¹⁸ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

Ketiga, Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian. Prinsip ini lebih mengedepankan dan menghargai kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam konsep ini memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan, bukan objek yang tidak berkemampuan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Keempat, Prinsip Berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun diawal peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan berkurang bahkan dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya, program pemberdayaan harus dirancang dengan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman serta keterampilan pada setiap individu yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Sebelum adanya istilah penyandang disabilitas, Indonesia memiliki beberapa istilah yang digunakan pada dokumen legal dalam menyebut orang dengan kebutuhan khusus. Hal ini didapatkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2014. Adapun beberapa istilah yang ada pada riset tersebut adalah 1) bercacat, 2) orang dalam keadaan kurang jasmani dan rohani, 3) tuna, 4) orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, 5) penderita cacat, 6) penyandang kelainan-kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial, 7) anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa), dan 8) penyandang cacat. Adanya ragam pemilihan istilah untuk orang dengan kebutuhan khusus inilah membuktikan bahwa stigma istilah ini sangat penting.¹⁹

Menurut penelitian yang dilakukan Dini Widinarsih, pemahaman masyarakat mengenai istilah orang dengan kebutuhan khusus ini dapat membawa pemahaman diskriminatif terhadap orang dengan kebutuhan khusus, dimana hal tersebut diakibatkan adanya konotasi negatif yang berakar dari normalisasi yang ada pada masyarakat.²⁰ Orang yang dianggap memiliki penampilan tubuh berbeda dianggap sebagai orang yang tidak diinginkan. Tentu stigma negatif berbasis disabilitas tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Dengan demikian, penulis akan

¹⁹ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas," *Jurnal Inklusi* 3, no. 2 (Desember , 2016).

²⁰ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Journal of Social Welfare*. Hlm 8

memberikan pengertian istilah untuk orang dengan kebutuhan khusus yang sekarang berlaku di Indonesia.

1) Pengertian Istilah Difabel

Istilah difabel ini diambil dari pangkasan kata bahasa Inggris ‘*differently abled*’ yang memiliki arti ‘individu dengan kemampuan berbeda’. Dikutip dari jurnal Mengikat Makna Diskriminasi karya Arif Maftuhin, istilah *differently abled* menurut Zola memiliki makna bahwa kemampuan penyandang disabilitas mungkin saja tidak berjalan secara ‘normal’, namun mereka memiliki kemampuan untuk melakukan alternatif kegiatan dengan caranya sendiri. Salah satu contoh kegiatannya adalah membaca untuk tuna netra. Mereka dapat melakukan hal tersebut dengan cara meraba huruf braille.²¹

Penggunaan istilah difabel ini diharapkan dapat dipahami bahwasannya kata ‘*disability*’ bukan lawan dari ‘*ability*’. Lawan kata *disability* adalah *non-disability*, sedangkan lawan kata *ability* adalah *inability*. Jadi, orang dengan *disability* bukan memiliki “kemampuan yang berbeda” seperti yang diklaim oleh istilah “*difability*”, kemampuan penyandang disabilitas mungkin saja tidak berjalan secara ‘normal’, namun mereka memiliki kemampuan untuk melakukan alternatif kegiatan dengan caranya sendiri.

Penggunaan istilah difabel digunakan dalam penelitian ini karena kata difabel sendiri merupakan kata benda yang mengacu kepada

²¹ Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi, hlm. 4

“manusia”nya, yakni orang dengan perbedaan fungsi jasmani dan rohani. Kata difabel merujuk pada kemampuan manusia yang berbeda-beda dan dianggap lebih nyaman serta sopan dalam percakapan komunitas. Sebutan ini dinilai sejalan dengan ideologi yang memanusiakan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta merupakan bagian dari keragaman umat manusia.

2) Pengertian Istilah Penyandang Disabilitas

Istilah Penyandang disabilitas ini pada akhirnya digunakan dalam dokumen legal yang ada di Indonesia, dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menyatakan Penyandang Disabilitas adalah:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²²

Alasan dijadikannya Penyandang Disabilitas sebagai bahasa yang legal dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia menggantikan Istilah Penyandang Cacat tentunya dengan beberapa pertimbangan.

Dalam jurnal karya Dini Widinarsih yang berjudul Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi mengatakan sebab Penyandang Disabilitas dijadikan bahasa legal menggantikan Penyandang Cacat antara lain; dalam aspek bahasa, kata cacat sendiri

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

cenderung memiliki makna negatif. Kata cacat hadir akibat adanya kekuasaan yang memberikan identitas kepada sekelompok individu yang dianggap cacat. Sedangkan cacat bukan realita keberadaan seseorang melainkan konstruksi sosial. Hal lainnya yang menjadikan Penyandang Cacat bukan lagi sebagai bahasa legal karena sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Derajat kita di mata Tuhan adalah sama, tanpa terkecuali. Terakhir, Dini juga menjelaskan istilah penyandang cacat juga menimbulkan perilaku tidak baik masyarakat kepada orang tersebut.

b. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sudah ada sedari manusia lahir dan bersifat universal serta tidak dapat dicabut. Hakikat HAM sendiri harus selalu dihormati, dilindungi serta dipertahankan, terutama kepada kelompok rentan terkhusus penyandang disabilitas. Hal inilah yang mendasari dibentuknya peraturan atau konferensi yang mengatur terkait disabilitas.

Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai hak disabilitas sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.²³ Dalam perundangan tersebut menyatakan bahwa hak pemilik kekhususan yakni

²³ Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 26, 2017): hlm. 6.

penyandang disabilitas bersifat konstitusional, oleh sebab itu negara wajib menjalankan dan mengupayakan pemenuhannya.

Adapun hak-hak disabilitas sudah tercantum pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 5. Hak-hak penyandang disabilitas tersebut antara lain: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta Konsesi.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan proses atau strategi yang dipilih oleh peneliti untuk menggabungkan secara menyeluruh komponen riset dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian kali ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.

Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau

²⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1)”.

ikatan tertentu dengan melibatkan sumber yang beragam.²⁵ Penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya.²⁶

Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian ini agar bisa menangkap kompleksitas kegiatan pemberdayaan yang berlangsung untuk para penyandang disabilitas melalui program E-Warong guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai penelitian adalah melihat angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Kapanewon Kokap, serta adanya kegiatan pemberdayaan yang ditujukan oleh penyandang disabilitas di dusun, melalui program e-warong yang dikelola oleh Kelompok Difabel Desa Hargomulyo.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hal yang perlu diperhatikan adalah sumber data. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diklasifikasikan menurut jenisnya yakni, sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

²⁵ Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

²⁶ Ibid., hlm 48.

informan, lokasi penelitian, objek/subjek penelitian. Biasanya, data ini diperoleh dari hasil wawancara.²⁷

Pada penelitian ini, data primer di dapat dari observasi dan wawancara terhadap informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang, diantaranya anggota Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo, pihak Kalurahan Hargomulyo, serta pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan Kelompok Difabel Desa Hargomulyo.

Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data tidak langsung atau sumber data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder dijadikan penunjang dari data primer agar penelitian lebih lengkap. Adapun data sekunder pada penelitian ini didapat dari buku, jurnal skripsi, atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber yang dibutuhkan atau biasa dikenal sebagai informan, subjek data bisa juga berupa benda atau tempat yang dijadikan sasaran. Pada penelitian ini subjek yang dipilih adalah informan yang memiliki informasi pokok yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik ini merupakan pengambilan data dengan mengandalkan pertimbangan dan penilaian tersendiri dari peneliti.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Adapun penilaian yang dipilih sebagai subjek penelitian ini yakni orang-orang yang terikat dengan KDD Hargomulyo diantaranya, pengurus Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo Kulon Progo, pengurus E-Warong KDD Hargomulyo, pihak lain yang bersangkutan seperti anggota Kalurahan Hargomulyo, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data. Ini dapat berupa orang, komunitas, maupun barang yang akan diteliti. Objek dalam penelitian kali ini yakni praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui Program Kerja E-Warong dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.

5. Teknik Pengumpulan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dalam pengambilan informan. *Purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa informasi atau memiliki tujuan khusus.²⁸

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 52.

Informan yang bertindak sebagai sumber data serta informasi harus memenuhi syarat. Yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pengurus Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo Kulon Progo yang tergabung dalam program kepengurusan E-Warong, ketua program E-Warong Hargomulyo sebagai sarana pemberdayaan yang akan diteliti, para pengurus e-warong, pihak lain yang bersangkutan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

6. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Dalam observasi ini, peneliti dapat mengetahui perilaku dari individu yang diamati kegiatan atau permasalahannya, serta makna dari perilaku itu. Pada kegiatan observasi ini, akan diperoleh mengenai

gambaran umum terkait penelitian yang akan diambil serta langkah untuk menentukan wawancara.²⁹

Menurut Sanafiah Fasial dalam buku Metode Penelitian Pendidikan karya Sugiono, observasi dapat dibagi menjadi tiga, yakni: observasi partisipasi (peneliti terlibat langsung pada kegiatan sehari-hari orang yang diteliti), observasi secara terang-terangan dan tersamar (peneliti berterus terang sedang melakukan penelitian, namun ada kalanya tidak berterus terang), dan observasi tak berstruktur (tidak ada persiapan).³⁰

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung diawali dengan menghubungi TKSK Kokap untuk memberitahu dan menanyakan terkait kepentingan penelitian. Setelah mendapatkan informasi dari TKSK Kokap terkait penelitian yang akan diambil, yakni mengenai KDD Hargomulyo yang mengelola E-Warong, peneliti diarahkan untuk langsung menemui salah satu tokoh difabel Hargomulyo.

Setelah melakukan observasi dan mendapatkan informasi dari TKSK Kokap, peneliti lantas mendatangi tokoh difabel Hargomulyo yang dimaksud, yaitu dengan Bapak Hasta Nurani selaku wakil ketua KDD Hargomulyo dan juga ketua E-Warong. Pada kesempatan itu, peneliti memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada observasi ini, peneliti menjelaskan bahwa ingin melaksanakan penelitian terkait E-Warong KDD Hargomulyo.

²⁹ Ibid. Hlm 112-113

³⁰ Ibid. Hlm 310-313

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam buku Metode Penelitian Pendidikan karya Sugiono merupakan interaksi antar dua orang guna mendapatkan/bertukar informasi, ide atau gagasan melalui tanya jawab terkait topik tertentu.³¹ Wawancara sendiri merupakan Teknik pengumpulan data yang melibatkan perasaan, persepsi, pikiran dan pendapat mengenai suatu kegiatan, fenomena dan realita.

Wawancara ini dilaksanakan setelah kegiatan observasi. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam kegiatannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah dibentuk sebelumnya, kemudian pertanyaan wawancara mengalir secara mendalam sesuai dengan topik penelitian.

Pada prosesnya, peneliti membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu pelaksanaan wawancara. Peneliti juga mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara dengan maksud memperdalam penelitian. Pada saat wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pelengkap dari Teknik pengumpulan data yang sudah dibahas diatas. Dokumen sendiri merupakan catatan atau

³¹ Ibid. Hlm 317

bukti dari sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi sendiri tidak melulu berupa foto atau gambar, namun dapat juga berupa audiovisual, kebijakan, aturan, bahkan catatan pribadi individu yang bersangkutan terkait penelitian. Hasil penelitian akan lebih bisa dipercaya apabila terdapat dokumentasi yang dilampirkan.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo terkait data penyandang disabilitas melalui buku “Laporan Hasil Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY Tahun 2021” serta, dokumen yang berasal dari pembukuan E-Warong KDD Hargomulyo beserta gambar kegiatan KDD Hargomulyo dan pengelolaannya dalam E-Warong.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berasal dari berbagai sumber dan triangulasi data (pegumpulan data bermacam-macam) hingga data jenuh. Sifat analisis data kualitatif sendiri induktif. Artinya, analisis yang sudah diperoleh berdasarkan data selanjutnya akan dikembangkan pola hubungannya menjadi hipotesis (realita khusus ke umum). Analisis data dalam kualitatif dilakukan dari awal sampai akhir, yakni pada saat sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, hingga selesai di lapangan.

Bogdan menyatakan analisis data merupakan proses penyusunan dan pencarian yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan data yang mudah untuk dipahami dan

akan bermanfaat untuk orang lain.³² Tentunya dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang akan diperoleh dalam bentuk deskriptif. Dalam buku Metode Penelitian Pendidikan yang ditulis oleh Sugiono, terdapat langkah analisis data menurut Miles dan Huberman yang akan penulis jadikan acuan. Berikut langkah tersebut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahapan ini merupakan pengolahan data. Data yang awalnya sudah didapatkan dan sangat banyak, pada tahapan ini akan di pilah mana yang pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data tidak penting. Nantinya, data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini juga, peneliti akan menajamkan analisis mengenai data yang sudah diperoleh sehingga akan menemukan data yang lebih jelas.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan hasil dari penelitian yang sudah terlaksana dan disusun secara rinci yang akan berguna untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang sudah dikumpulkan secara terperinci ini selanjutnya akan dicari pola hubungan yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan kesimpulan. Selanjutnya, dalam penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan hal yang bersangkutan dengan itu.

³² Ibid. Hlm 334

Penyajian data diawali dengan memberikan kalimat naratif deskriptif terkait hasil penelitian yakni data-data yang telah diperoleh peneliti melalui proses triangulasi dan reduksi data. Setelah melakukan kedua hal tersebut, kemudian dilakukan analisis dalam pembahasan. Pada pembahasan peneliti menganalisis dan mengkaji data untuk dibandingkan dengan teori yang telah dipilih peneliti yaitu mengenai praktik pemberdayaan difabel melalui program kerja E-Warong.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian dan merupakan pemberian makna terhadap data-data yang sudah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk yang unik dan dikategorikan. Demikian prosedur pengolahan data dan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

8. Uji Keabsahan

Dalam melakukan penelitian, tentu seorang peneliti memerlukan adanya bentuk pengujian data untuk membuktikan data yang diperoleh benar-benar valid dan kredibel. Pada penelitian kualitatif, data atau temuan dinyatakan valid ketika tidak ada perbedaan antara laporan yang dilaporkan peneliti dengan kejadian yang terjadi pada obyek yang diteliti. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono memiliki empat

kriteria, yakni uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).³³

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan uji kredibilitas data (validitas internal) triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan Triangulasi Sumber yakni menguji data menggunakan beberapa sumber dengan cara membandingkannya. Adapun sumber dari penelitian ini adalah subyek penelitian yaitu pengurus Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo Kulon Progo, pengurus E-Warong KDD Hargomulyo, pihak lain yang bersangkutan seperti anggota Kalurahan Hargomulyo, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan pada penelitian ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, pada bab ini juga berisi tinjauan pustaka yang berisi tiga penelitian yang relevan dengan peneltian saat ini. Dilanjutkan, bab ini

³³ Ibid.Hlm 366

membahas kerangka teori yang terdiri dari teori pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat, penyandang disabilitas, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada bab ini juga membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan informan, metode pengumpulan data, teknik analisa data, dan uji keabsahan.

BAB II berisi gambaran umum mengenai objek penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan profil dari e-warong yang dikelola oleh Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo, dimulai dari sejarah berdirinya hingga kepengurusannya. Dilanjutkan mengenai uraian singkat terkait Kelompok Difabel Desa Hargomulyo (KDD).

BAB III berisi pembahasan hasil penelitian. Bab ini menguraikan penelitian yang sudah dilakukan dengan menyantumkan analisisnya berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam hal ini penulis menguraikan proses pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui program e-warong beserta hambatan yang ada.

BAB IV berisi penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk upaya perbaikan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memaparkan beberapa saran untuk KDD Hargomulyo, pemerintah dan penelitian lanjutan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pemberdayaan difabel yang ada di KDD Hargomulyo melalui Program E-Warong dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Praktik pemberdayaan difabel yang ada di Kelompok Difabel Desa (KDD) Hargomulyo melalui Program E-Warong di dalamnya memiliki tiga aspek pemberdayaan, yakni: *Enabling*, *Empowering*, dan *Protecting*.

Pertama, pada aspek *Enabling* yang merupakan upaya melahirkan situasi yang menguatkan potensi masyarakat agar dapat berkembang dengan baik dilakukan dengan cara TKSK yang sebelumnya telah melihat potensi dari anggota KDD Hargomulyo yang telah mendirikan warung, lalu mengajak anggota KDD Hargomulyo untuk dapat mengembangkan warungnya lebih baik lagi dengan cara mengikutsertakan warungnya dengan Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) yang merupakan program pemberdayaan dari Kementerian Sosial dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana nantinya warung akan mendapatkan keuntungan dari program penyaluran tersebut.

Kedua, pada aspek *Empowering* dimana ini merupakan dukungan dalam mengembangkan potensi yang telah hadir sebelumnya yakni dengan

cara pemerintah daerah atau Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo memberikan pelatihan, arahan, serta bimbingan kepada anggota KDD Hargomulyo yang merupakan calon pengurus E-Warong dalam tata cara pengelolaan Elektronik Warung seperti, penggunaan aplikasi dalam pelayanan E-Warong, penggunaan mesin EDC dalam kegiatan transaksi, pembukuan dan pengelolaan warung sesuai dengan kebijakan E-Warong yang ada.

Ketiga, pada aspek *Protecting* yang merupakan bentuk perlindungan dan pembelaan terhadap kegiatan yang dilakukan KDD Hargomulyo dalam pelaksanaan pemberdayaannya telah di sahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa Hargomulyo No 24 Tahun 2017. Pada wujud perlindungan kegiatan E-Warong, KDD Hargomulyo merupakan warung binaan dari Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dan merupakan warung terpilih, artinya mereka telah mendapatkan perlindungan terkait kegiatan pemberdayaan yang berjalan. Tidak hanya itu, wujud perlindungan dan pembelaan kegiatan E-Warong KDD Hargomulyo juga melalui monitoring dan pengawasan secara langsung setiap bulannya dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo melalui TKSK dan KPKD setempat.

2. Pada praktik pemberdayaan difabel terhadap KDD Hargomulyo melalui Program E-Warong, di dalamnya memiliki empat prinsip pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, prinsip partisipatif, prinsip keswadayaan dan prinsip berkelanjutan.

Pertama, prinsip kesetaraan merupakan wujud pemerataan kedudukan, pemikiran hingga partisipasi setiap elemen masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Wujud dari prinsip kesetaraan ini yakni dengan dipilihnya KDD Hargomulyo sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penyaluran BPNT melalui E-Warong, dimana difabel merupakan masyarakat marginal.

Kedua, prinsip partisipatif merupakan wujud pemberian kewenangan atau sebagian kewenangan dalam pemberdayaan. Hal ini terjadi dalam adanya musyawarah dalam pengelolaan E-Warong, kebebasan dalam pengelolaan E-Warong, serta pendampingan dari Dinas Sosial terkait.

Ketiga, prinsip keswadayaan merupakan adanya kemandirian dari kegiatan pemberdayaan difabel yang sudah berjalan dengan cara menjadikan difabel menjadi obyek pemberdayaan, artinya mereka menjalankan kegiatan pemberdayaan berdasarkan kemampuan mereka sendiri.

Keempat, prinsip berkelanjutan disini kegiatan pemberdayaan telah dirancang dengan baik, dilihat dari adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan modal untuk keberlanjutan E-Warong KDD Hargomulyo kedepannya.

3. Hasil dari pemberdayaan difabel KDD Hargomulyo melalui program E-Warong ini berdampak pada segi ekonomi dan sosial kelompok. Dalam segi ekonomi, hadirnya kegiatan E-Warong KDD Hargomulyo ini menambah pendapatan kelompok maupun anggota pengurus. E-Warong mendapatkan

modal untuk membuka usaha warung menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dalam segi sosial, munculnya solidaritas anggota kelompok dan masyarakat, serta menghadirkan rasa tanggung jawab antar anggota.

4. Pada praktik pemberdayaan kelompok difabel desa Hargomulyo memiliki hambatan yang penulis klasifikasikan menjadi dua, yakni: hambatan yang berasal dari internal dan hambatan yang berasal dari faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal yakni adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimana Sumber Daya Manusia yang ada sedikit dan mereka mengalami kesulitan dalam kegiatan fisik. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor eksternal yakni adanya kerusakan bahan pokok yang datang dari supplier, terjadinya server-down dalam penggunaan aplikasi E-Warong karena terkendala jaringan dan terakhir ketidakhadiran Keluarga Penerima Manfaat saat kegiatan penyaluran berjalan, dimana hal tersebut tidak boleh terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran ditunjukkan kepada.

1. Kelompok Difabel Desa Hargomulyo

- a. Peneliti merekomendasikan KDD Hargomulyo dapat melakukan kegiatan pemberdayaan dengan lebih semangat dan rajin agar setiap anggota yang ada termotivasi untuk dapat lebih berdaya.
- b. E-Warong KDD Hargomulyo dapat menggunakan sisa hasil usaha (SHU) dari kegiatan penyaluran selama ini untuk pengembangan E-Warong yang lebih baik lagi.

- c. E-Warong KDD Hargomulyo dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk memberikan motivasi kepada anggota kelompok maupun pengurus untuk mendapatkan ide dalam pengelolaan warung.

2. Pemerintah

- a. Pemerintah, khususnya Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dapat memberikan pelatihan terkait pemanfaatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari kegiatan penyaluran BPNT melalui E-Warong agar warung terpilih dapat lebih berkembang.
- b. Pemerintah dapat memberikan fasilitas penunjang yang lebih baik lagi terkait kegiatan pemberdayaan untuk memberikan ilmu terkait ekonomi produktif.

3. Penelitian Selanjutnya

Peneliti merekomendasikan untuk dapat lebih memahami kembali terkait kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong agar dapat mendapatkan banyak sudut pandang keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2011.

Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Hasil Pemutakhiran Data PPKS Dan PSKS Dinas Sosial DIY Tahun 2021*. Yogyakarta.

Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi/Penulis, Jim Ife & Frank Tesoriero: Penerjemah, Sastrawan Manurung, Nurul Yakin, M. Nursyahid: Penyunting, Saifudin Zuhri Qudsy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Raco, Jozef Richard. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1).

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

- Estri Purwandari, NIM 11230086. "Pemberdayaan Difabel Daksa Oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD): Studi Di Dusun Piring, Desa Rihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DIY." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16346/>.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. *Pemberdayaan*. Jakarta: LSPS: Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, 2016.
- Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas." *INKLUSI* 3, no. 2 (December 3, 2016): 139–62. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 26, 2017): 161–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- Puspita, Damiana Vania, and Eka Zuni Lusi Astuti. "Praktik Baik Pemberdayaan Difabel Oleh Kelompok Difabel Desa Makmur Jati Mandiri." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)* 22, no. 2 (January 3, 2022). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v22i2.312>.
- Riadi, Muchlisin. "Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat." Accessed October 3, 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html>.
- Surwanti, Arni. "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (March 1, 2014): 40–58.
- Wahyudi, Agus Imam. "Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Cabean, Bantul, Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Widiastuti, Rr Siti Kurnia, Nurus Sa'adah, Muhammad Amin, H. Muhammad Damami, and Adib Sofia. "Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis

Penelitian Komunitas,” 1–35. Yogyakarta: Pustaka Pelajar = Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36584/>.

Widinarsih, Dini. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)* 20, no. 2 (November 18, 2019). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.239>.

SUMBER INTERNET

“BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.” Accessed August 25, 2022. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>.

Indonesia, Article 33. “[TEMPO.CO] Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.” *Article 33 Indonesia* (blog), Oktober 2021. <https://article33.or.id/id/berita/tempo-co-hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas/>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hasta Nurani, Ketua E-Warong APBD KDD Hargomulyo, 27 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Hepy Eko Nugroho, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 21 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Sakiran, Ketua E-Warong APBN KDD Hargomulyo, 27 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Ketua KDD Hargomulyo, 24 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Sukarman, Anggota KDD Hargomulyo, 24 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Taufiq Aji, TKS K Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, 14 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Triharyono, Kamituwa Kalurahan Hargomulyo Kokap Kulon Progo, 14 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Wahyu Budiarto, Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 21 November 2022.

Wawancara dengan Ibu Sumiyati, Bendahara E-Warong KDD Hargomulyo, 27 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Hartutik, Humas E-Warong KDD Hargomulyo, 24 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Jamari, Anggota E-Warong KDD Hargomulyo, 27 September 2022.

